



Bulog Mulai Pasok Beras SPHP untuk Koperasi Merah Putih di Yogyakarta

YOGYA, TRIBUN - Perum Bulog Kantor Wilayah Yogyakarta mulai memasok beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk Koperasi Merah Putih. Khusus di DI Yogyakarta, terdapat empat Koperasi Merah Putih yang menjadi percontohan nasional, dan siap diluncurkan pada Senin (21/7) mendatang.

"Tiga di Sleman dan satu di Bantul, itu sudah kami *support* semuanya," tandas Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil Yogyakarta, Ninik Setyowati, saat ditemui di Kelurahan Gunungketur, Pakualaman, Kota Yogyakarta, Jumat (18/7).

Dengan keberadaan Koperasi Merah Putih, akses masyarakat untuk menjangkau beras SPHP semakin luas, tidak melulu di pasar tradisional.

Selain beras SPHP, Bulog juga memasok deretan komoditas komersil lainnya ke Koperasi Merah Putih, seperti minyak goreng dan gula pasir.

"Kalau yang komersil sistemnya konsinyasi. Untuk beras SPHP itu harus beli *cash*, disesuaikan dengan kemampuan Koperasi Merah Putih. Tapi, di awal kami siap *support*, kami berikan konsinyasi. Tidak ada alokasi khusus, itu seperti bisnis biasa. Ketika koperasi meminta, kami siap mengisi. Harga sama, misalnya beras SPHP maksimal Rp12.500, sesuai dengan HET-nya," ujarnya.

Sementara itu, 21.064 warga Kota Yogyakarta menerima bantuan pangan beras untuk alokasi Juni-Juni 2025. Penyerahan bantuan pangan beras pertama di ta-

hun 2025 tersebut, diawali dari Kelurahan Gunungketur. Masing-masing penerima bantuan pangan berhak membawa pulang 20 kilogram beras untuk alokasi Juni-Juli yang diberikan sekaligus.

Ninik menyebut, bantuan pangan beras memang baru digelotorkan perdana pada pertengahan tahun, selaras arahan Badan Pangan Nasional. "Bulog hanya operator yang menerima penugasan dari regulator, dalam hal ini Badan Pangan Nasional. Jadi, di 2025 kami baru menerima penugasan di bulan Juni, sejak terakhir di 2024," ujarnya.

Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menuturkan, dibanding 2024, jumlah penerima bantuan pangan di wilayahnya mengalami penurunan drastis. Pada tahun lalu,

tercatat sekitar 27.000 warga Kota Yogyakarta menerima alokasi yang bersumber dari cadangan beras pemerintah tersebut.

"Karena DTSN (Data Tunggak Sosial Ekonomi Nasional) disesuaikan, dikoreksi lagi. Setelah di-update, di situ kan ada pedoman, desil satu, desil dua, desil tiga, itu ditapis lagi. Setelah ditapis, turun sekitar 6.000 di Kota Yogya," tandasnya.

Menurut Hasto, langkah tersebut diterapkan oleh pemerintah pusat, agar bantuan yang digelontorkan tepat sasaran untuk warga yang benar-benar membutuhkan. Ia berharap pemakluman dari warga yang akhirnya harus tercoret dan tidak lagi mendapat uluran bantuan pangan tahun ini. **(aka)**



Kalau yang komersil sistemnya konsinyasi. Untuk beras SPHP itu harus beli cash, disesuaikan dengan kemampuan Koperasi Merah Putih.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 10 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005